

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

Melinia Salma*, Nur Diana, Hariri *****

Email: melinia625@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This Research was conducted with the aim of analyzing the effect of implementing corporate governance principles on the management of village funds by the village government. This study uses a quantitative research methods with a descriptive approach. Tebuwung Village, Mentaras Village, Mojopetung Village, Dukuhkembar Village, Tiremenggall Village, Petiyintunggal Village, Bangeran Village, Madumulyo Village, Imaan Village, Jrebeng Village, Dukun District, Gresik Regency. Selected respondents in this study were the village Head, Village Secretary, planning committee, and finance officer were the respondents selected in this study. This research was conducted through a filling questionnaire. The principles of food corporate governance that has been discussed so far is the principle of justice. Transparency, independence, and responsibility, on the other hand, have not been implemented to their full potential. The implementation of good corporate governance is carried out in general because the village government has carried out activities in accordance with applicable regulation.

Keyword : *Good Corporate Governance, Management of Village Funds, Village Government*

PENDAHULUAN

Dikomposisi kedaulatan pada negara ini, otonomi daerah di tingkat pedesaan memerlukan pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah federal, atas sumber dana desa dan pengelolaan uang tersebut. Penyusunan APBDes merupakan bagian dari penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembangunan (APBD) Tahunan yakni agenda tahunan yang muncul beberapa akar pendapatan dan bagian belanja desa. Desa dapat lebih bertanggungjawab dalam mengelola uang yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai dari akibat dari pelimpahan otonomi pengelolaan keuangan desa. Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 yang telah diubah ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dikatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun, kenyataan yang terjadi di beberapa desa, masyarakat mempertanyakan alokasi dana desa yang digunakan tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan ADD. Seperti halnya kasus yang terjadi pada Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebagai tersangka karena terduga melakukan korupsi dana desa tahun 2016-2017. Sehingga dari kasus ini penggunaan ADD tidak digunakan sesuai dengan kebijakan penggunaan ADD. Adanya kasus tersebut karena tidak adanya transparansi dari pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam masyarakat, serta keengganan masyarakat untuk memenuhi komitmennya, menghambat pertumbuhan nasional (Quantum:2009). Untuk mengatasi masalah tersebut tentu harus ada transparansi dana desa sehingga masyarakat akan mengetahui turunnya anggaran dana desa.

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ismail dkk. (2016) Hubungan atau kontrak antara agen (manajer) dan pemilik dikenal sebagai teori keagenan (*principals*). Jika pemilik memberikan otoritas pengambilan keputusan manajemen, pengaturan ini dapat berfungsi dengan sukses. Dalam teori keagenan, pemilik adalah orang yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agen atau manajer untuk melakukan semua proses kegiatan atas nama pemilik yang berwenang dalam mengambil keputusan

Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Terkait Desa. Pada semua monitoring desa, dan banyak berbentuk nominal dan barang yang terkait pada pelaksanaan moneter desa, dikuasai hal tersebut mendapatkan pendapatan, belanja, dan keuangan yang semuanya harus dikelola untuk pengelolaan keuangan desa yang baik. Penatausahaan uang desa harus direncanakan, diawasi, dan dinilai secara terbuka oleh seluruh warga masyarakat desa, serta harus dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemerintah desa

Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang disebut juga dengan perangkat desa sebagai unsur organisasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa berupaya memajukan masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya melalui pemberdayaan penduduk. Pada ketentuan penentuan pada kegiatan dan dukungan disesuaikan pada kepentingan beserta tujuan, pemberdayaan masyarakat desa berupaya meningkatkan kedewasaan dan kemakmuran di masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, ulah, kepekaan, dan pemanfaatan kapasitas.

Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahnya menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UU 1945). Pemberian otonomi kepala daerah untuk memacu tercapainya kemakmuran masyarakat pada tingkat reparsi publik, pemantapan dan pelibatan masyarakat dalam segala aspek pembangunan.

Konsep Good Corporate Governance

Struktur tata kelola perusahaan dapat dicirikan sebagai kerangka kerja yang memungkinkan berbagai konsep tata kelola untuk dibahas, diterapkan dan diatur didalam perusahaan. Struktur tata kelola khususnya harus diciptakan untuk memungkinkan operasi organisasi yang bertanggungjawab dan diatur.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Duadji (2012:201), pemerintah adalah kondisi filosofi, dugaan, dan berpola dengan pengertian tersebut sangat bermanfaat apabila landasan untuk meningkatkan pengetahuan budaya, dan administrasi umum. Sebagai ukuran penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi, pengertian pemerintahan berorientasi pada unsur eksternal, keluaran, hasil, dan dampak, yang meliputi upaya mencapai kesejahteraan yang setara bagi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi sektor publik di tingkat regional, nasional, dan global.

Transparansi

Transparansi, menurut Ultrafiah (2017), adalah asas yang menanggung pada seseorang yang mempunyai jalan masuk untuk menerima keterangan terkait kepengurusan, kedaulatan, dan keterangan mengenai strategi, alur perumusan dan pelaksanaan, serta hasilnya. Alat penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Sedarmayanti, 2012).

Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, konsistensi, dan prediktabilitas. Akuntabilitas adalah jenis akuntabilitas yang berasal dari pihak-pihak yang dipercaya oleh para pemangku kepentingan, dan menentukan berhasil atau tidaknya mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019).

Responsibilitas

(Azheri 2012:86) mendefinisikan tanggung jawab sebagai "segala sesuatu yang menanggung beban tugas," yang mencakup "keputusan, keahlian, bakat, dan keterampilan". Tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hukum yang berlaku dan untuk memulihkan atau mengkompensasi kerusakan yang dihasilkan.

Independensi

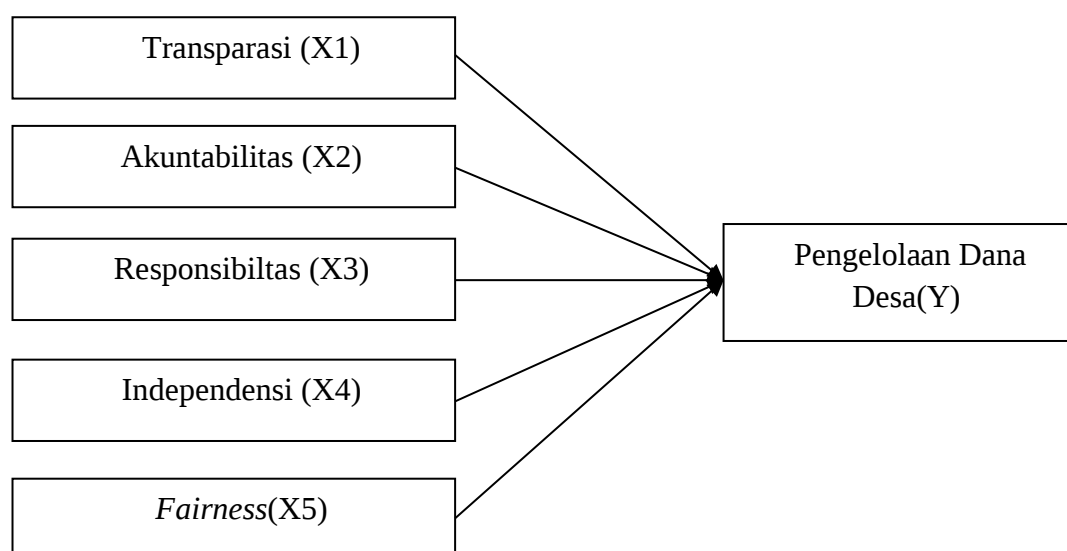
Kemandirian mengacu pada suatu kondisi dimana pemerintah ditangani tanpa masalah urusan atau tekanan yang bertentangan dengan aturan dan undang-undangan yang berfungsi, serta standar perusahaan yang kuat.

Fairness (Kesetaraan atau Kewajaran)

Kewajaran dan kesamaan pada pelaksanaan kebebasan masyarakat muncul pada kesepakatan dan aturan undang-undangan pada sesuai.

Kerangka Konseptual

Tabel 1 Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian:

H1 : Penerapan prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan *fairness*) berdampak terhadap pengelolaan dana desa.

H1a : Penerapan prinsip *good corporate governance* dari proksi transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H1b : Penerapan prinsip *good corporate governance* dari proksi akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H1c : Penerapan prinsip *good corporate governance* dari proksi *responsibility* berdampak terhadap pengelolaan dana desa.

H1d : Penerapan prinsip *good corporate governance* dari proksi independensi berdampak terhadap pengelolaan dana desa.

H1e : Penerapan prinsip *good corporate governance* dari proksi *fairness* berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan dengan metode pengisian kuesioner. Penelitian dilakukan di Desa Tebuwung, Desa Mentaras, Desa Mojopetung, Desa Dukuhkembar, Desa Desa Tiremenggal, Desa Petiyintunggal, Desa Bangeran, Desa Madumulyorejo, Desa Ima'an, Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian dikerjakan sejak bulan November 2021 hingga Januari 2022.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Asal muasal pada penelitian ini yaitu keterangan fundamental yang didapat dari penyebaran kuesioner pada skala *Likert* 5. Pilihan jawaban diberikan yakni sangat setuju : SS (skor 5), Setuju: S (skor 4), netral (skor 3), tidak setuju : TS (skor 2), sangat tidak setuju : STS (skor 1)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan_Dana_Desa	49	32	40	34,31	2,181
Transparansi	49	24	30	25,76	1,702
Akuntabilitas	49	24	30	26,14	1,744
Responsibilitas	49	15	20	17,14	1,291
Independensi	49	8	10	8,61	,671
Fairness	49	12	15	12,90	,872
Valid N (listwise)	49				

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data 49 responden adalah nilai minimum dari semua variabel adalah 8 dan nilai maksimum dari semua variabel adalah 40 dengan nilai mean tertinggi yaitu 34,31 dan nilai terendah 8,61 dengan kisaran standar deviasi pada angka 1.

Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Items	Signifikan	5%	Ket
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1	0,000	0,05	VALID
	Y2	0,000	0,05	
	Y3	0,000	0,05	
	Y4	0,000	0,05	
	Y5	0,000	0,05	
	Y6	0,000	0,05	
	Y7	0,000	0,05	
	Y8	0,000	0,05	
Transparansi (X1)	X1.1	0,000	0,05	VALID
	X1.2	0,000	0,05	
	X1.3	0,000	0,05	
	X1.4	0,000	0,05	
	X1.5	0,000	0,05	
	X1.6	0,000	0,05	
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,000	0,05	VALID
	X2.2	0,000	0,05	
	X2.3	0,000	0,05	
	X2.4	0,000	0,05	
	X2.5	0,000	0,05	
	X2.6	0,000	0,05	
Responsibilitas (X3),	X3.1	0,000	0,05	VALID
	X3.2	0,000	0,05	
	X3.3	0,000	0,05	
	X3.4	0,000	0,05	
Independensi (X4)	X4.1	0,000	0,05	VALID
	X4.2	0,000	0,05	
Fairness (X5).	X5.1	0,000	0,05	VALID
	X5.2	0,000	0,05	
	X5.3	0,000	0,05	

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Pada tabel 3 diketahui bahwa nilai Sig dari variabel pengelolaan dana desa (Y) Dari kedelapan mempunyai nilai Sig < 0,05 sehingga instrumen pada variabel Pengelolaan dana desa valid. Variabel Transparansi (X1) menunjukkan hasil nilai Sig dari variabel transparansi (X1) pada keenam item pernyataan mempunyai nilai Sig < 0,05 sehingga instrumen pada transparansi valid. Variabel Akuntabilitas (X2) menunjukkan hasil nilai Sig dari variabel akuntabilitas (X2) pada keenam item pernyataan tersebut mempunyai nilai Sig < 0,05 sehingga instrumen pada akuntabilitas valid. Variabel Responsibilitas (X3) menunjukkan hasil nilai Sig dari variabel responsibilitas (X3) pada keempat item pernyataan tersebut mempunyai nilai Sig < 0,05 sehingga instrumen pada responsibilitas valid. Variabel Independensi (X4) menunjukkan hasil nilai Sig dari variabel independensi (X4) pada kedua item pernyataan tersebut memiliki nilai Sig < 0,05 sehingga instrumen pada independensi valid. Variabel

fairness (X5) menunjukkan hasil nilai Sig dari variabel *fairness*(X5) pada ketiga item pernyataan tersebut mempunyai nilai Sig < 0,05 sehingga instrumen pada *fairness* valid.

b. Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Y	X1	X2	X3	X4	X5
N		49	49	49	49	49	49
PoissonParameter ^{a,b}	Mean	000000 0	000000 0	000000 0	000000 0	000000 0	000000 0
	Absolute	,324	,338	,311	,338	,371	,364
MostExtremeDifferences	Positive	,205	,225	,211	,214	,260	,253
	Negative	-,324	-,338	-,311	-,338	-,371	-,364
Kolmogorov-Smirnov Z		2,267	2,367	2,178	2,367	2,599	2,545
Asymp. Sig. (2-tailed)		,070	,057	,060	,062	,058	,065

a. TestdistributionisPoisson.

b. Calculatedfrom data.

Sumber data : diolah ditahun 2022

Dilihat dari tabel 4 dari hasil uji normalitas pada variabel pengelolaan dana desa didapatkan hasil nilai kolmogorov smirnov sebesar 2,267 dengan sig sebesar 0,070 > 0,05 yang artinya data dari variabel pengelolaan dana desa berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel transparansi didapatkan hasil nilai kolmogorov smirnov sebesar 2,367 dengan sig sebesar 0,057 > 0,05 yang artinya data dari variabel transparansi berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel akuntabilitas didapatkan hasil nilai kolmogorov smirnov sebesar 2,178 dengan sig sebesar 0,060 > 0,05 yang artinya data dari variabel akuntabilitas berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel responsibilitas didapatkan hasil nilai kolmogorov smirnov sebesar 2,367 dengan sig sebesar 0,062 > 0,05 yang artinya data dari variabel responsibilitas berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel independensi didapatkan hasil nilai kolmogorov smirnov sebesar 2,599 dengan sig sebesar 0,058 > 0,05 yang artinya data dari variabel independensi berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel *fairness* didapatkan hasil nilai kolmogorov smirnov sebesar 2,545 dengan sig sebesar 0,065 > 0,05 yang artinya data dari variabel *fairness* berdistribusi normal.

C. Uji Reliabilitas

Variable	Cronbac's Alpha	Keterangan
X1	0,672	Reliabel
X2	0,664	Reliabel
X3	0,643	Reliabel
X4	0,637	Reliabel
X5	0,263	Reliabel
Y	0,747	Reliabel

Sumber data : diolah ditahun 2022

Variabel Transparansi (X1) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,672, Variabel Akuntabilitas (X2) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,664, Variabel Responsibilitas (X3) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,643, Variabel Independensi (X4) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,637, Variabel Fairness (X5) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,263, Variabel Pengelolaan dana desa (Y) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,747, hal ini dinyatakan bahwa variabel keenam tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan variabel tersebut adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,561	3,232		1,411	,165		
Transparansi	,158	,218	,123	,723	,474	,254	3,939
Akuntabilitas	,492	,220	,393	2,239	,030	,238	4,200
Responsibilitas	,191	,216	,113	,884	,382	,449	2,225
Independensi	-,013	,368	-,004	-,037	,971	,573	1,745
Fairness	,749	,364	,299	2,060	,046	,348	2,875

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa

Sumber data : diolah ditahun 2022

Pada tabel diatas menyatakan nilai VIF variabel transparansi sebesar $3,939 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,254 > 0,1$. Nilai VIF variabel akuntabilitas sebesar $4,200 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,238 > 0,1$. Nilai VIF variabel responsibilitas sebesar $2,225 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,449 > 0,1$. Nilai VIF variabel independensi sebesar $1,745 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,578 > 0,1$. Nilai VIF variabel *fairness* sebesar $2,875 < 10$ dan nilai tolerance $0,348 > 0,1$. Dapat disimpulkan kelima variabel tersebut memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,1$ sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi.

b. Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3,048	2,006		-1,519	,136
Transparansi	-,158	,135	-,323	-1,165	,250
Akuntabilitas	,124	,136	,260	,909	,369
Responsibilitas	,257	,134	,399	1,916	,062
Independensi	-,038	,228	-,031	-,168	,867
Fairness	,053	,226	,056	,236	,814

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Sumber data : diolah ditahun 2022

Pada tabel diatas didapatkan hasil tingkat signifikan variabel Transparansi sebesar 0,250, variabel akuntabilitas sebesar 0,250, variabel responsibilitas sebesar 0,062, variabel independensi sebesar 0,867, dan variabel *Fairness* sebesar 0,814. Kelima

variabel tersebut terdapat nilai Sig > 0,05, sehingga disebut bukan terjadinya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,561	3,232		1,411	,165
	Transparansi	,158	,218	,123	,723	,474
	Akuntabilitas	,492	,220	,393	2,239	,030
	Responsibilitas	,191	,216	,113	,884	,382
	Independensi	-,013	,368	-,004	-,037	,971
	Fairness	,749	,364	,299	2,060	,046

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa

Sumber data : diolah ditahun 2022

Ditinjau tabel tersebut, maka terdapat model regresi seperti berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 4,651 + 0,158X_1 + 0,492X_2 + 0,191X_3 - 0,013X_4 + 0,749X_5 + e$$

Sig0,474 Sig0,030 Sig0,382 Sig0,971 Sig0,046

Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156,209	5	31,242	18,607	,000 ^b
	Residual	72,199	43	1,679		
	Total	228,408	48			

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa

b. Predictors: (Constant), Fairness, Responsibilitas, Independensi, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber data : diolah ditahun 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat disimpulkan : F_{hitung} memiliki nilai sebesar 18,607 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, maka artinya H_1 diterima sedangkan H_0 ditolak. Sehingga dapat dinyatakan variabel independen yaitu Transparansi (X1), akuntabilitas (X2), responsibilitas (X3), independensi (X4), dan fairness (X5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

b. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,827 ^a	,684	,647	1,296	1,524

a. Predictors: (Constant), Fairness, Responsibilitas, Independensi, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa

Sumber data : diolah ditahun 2022

Hasil Adjusted R Square pada tabel pada pengujian koefisien determinasi adalah 0,647 yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan semuanya memberikan kontribusi 0,647 (64,7%) terhadap variabel pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini sisanya sebesar 0,353 (35,3%). Pada tabel, nilai Std Error of the Estimate (SEE) adalah 1,524, semakin rendah nilai SEE, semakin tepat prediksi variabel dependen.

c. Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,561	3,232		1,411	,165
Transparansi	,158	,218	,123	,723	,474
Akuntabilitas	,492	,220	,393	2,239	,030
Responsibilitas	,191	,216	,113	,884	,382
Independensi	-,013	,368	-,004	-,037	,971
Fairness	,749	,364	,299	2,060	,046

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa

Sumber data : diolah ditahun 2022

Tujuan dari uji t untuk melihat apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_a disetujui, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak. Dalam menentukan t_{tabel} menggunakan rumus $df = NK - 4 = 58$ dan ambang atas signifikansi 0,05 (5%) dengan *two tail test* (0,025) diperoleh hasil sebesar 2,001. Sebuah tes yang signifikan juga dapat digunakan . Jika nilai $Sig < 0,05$ maka H_a diterima, jika nilai $sig > 0,05$ H_a ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Adapun kesimpulan pada hasil penelitian ini yaitu;

1. Proksi transparansi tidak berakibat signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Proksi akuntabilitas berdampak positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
3. Proksi responsibilitas tidak berdampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
4. Proksi independensi tidak berdampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
5. Proksi *Fairness* berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterikatan mencari pilihan jurnal dan buku, dikatakan belum semua menggunakan jurnal dan buku terbaru, atau diatas tahun 2015.
2. Keterikatan pada penemuan populasi,
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 10 desa yaitu Desa Tebuwung, Desa Mentaras, Desa Mojopetung, Desa Dukuhkembar, Desa Desa Tiremenggal, Desa Petiyintunggal, Desa Bangeran, Desa Madmulyorejo, Desa Imaan, Desa Jrebeng.

Saran

1. Untuk peneliti yang akan meneliti ini lebih lanjut diharapkan bisa menceritakan lebih rinci tentang penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk peneliti yang akan meneliti ini lebih lanjut diinginkan bisa menambah jangkauan pendalaman gambaran dengan bertambah angka yaitu lebih kepada 1 kecamatan sehingga gambarannya sama dengan situasi sebenarnya.
3. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya, sebelum melakukan penelitian hendak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak desa sehingga saat penyebaran kuesioner dan melakukan pendampingan saat proses pengisian kuesioner berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, & Soekarno. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 55–64.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, sri devi, & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding*, 2017, 978–979.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa* (S. Saat (ed.); Edisi 4). Jakarta: Erlangga.
- Binhadi, D. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Mimbar*, 28(2), 201–209.
- Fauzy, A. (2019). Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ilmu Administrasi Publik*.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Bandung: Gosyen Publishing.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kabul Setio Utomo, Sudarmo, D. G. S. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 50–66.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Kartika, A., Yasintha, P. N., Wiwin, K., & Wismayanti, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja ,Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Citizen*, 1(1), 1–9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Liputan6.com. (2020). *BUMDes Bakal Percepat Ekonomi Desa*. [Www.Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4413404/bumdes-bakal-percepat-ekonomi-desa](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4413404/bumdes-bakal-percepat-ekonomi-desa)
- Miftahudin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.

- Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo*(Issue 2).
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patrice, G. J. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo. *Agora*, 4(2), 273–279.

*) **Melinia Salma** adalah alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Malang

) **Nur Diana adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Hariri** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang